



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN  
KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI IV DPR RI  
KE PROVINSI PAPUA  
MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2018-2019**

\*

\*

\*

\*\*

\*\*\*

\*\*

\*

\*

\*

**JAKARTA 2019**



**LAPORAN**  
**HASIL KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI**  
**RESES MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2018-2019**  
**KE PROVINSI PAPUA**  
**TANGGAL 14-18 FEBRUARI 2019**

---

**1. PENDAHULUAN**

**A. DASAR KUNJUNGAN KERJA**

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib:
  - Pasal 58 ayat 3 huruf d terkait dengan Tugas Komisi dalam bidang pengawasan yaitu melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah
  - Pasal 58 ayat 4 terkait dengan Tugas komisi dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 11 Desember 2019.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI, tanggal 21 Januari 2019

**B. RUANG LINGKUP**

Sasaran Kunjungan Kerja meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi IV, yaitu Bidang Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, serta Pangan.

**C. SUSUNAN TIM**

Susunan Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI, antara lain:

NO.	NAMA	FRAKSI	KETERANGAN
1.	Dr. MICHAEL WATIMENA, S.E., M.M.	F.PD	KETUA TIM/PIMPINAN KOMISI IV
2.	ONO SURONO, S.T.	F.PDIP	ANGGOTA
3.	AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S.	F.PDIP	ANGGOTA
4.	H. AGUNG WIDYANTORO, S.H., M.Si.	F.PG	ANGGOTA

NO.	NAMA	FRAKSI	KETERANGAN
5.	Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.	F.GERINDRA	ANGGOTA
6.	SUSI SYAHDONA MARLENY BACHSIN, S.E., M.M.	F.GERINDRA	ANGGOTA
7.	Ir. ENDRO HERMONO, M.B.A.	F.GERINDRA	ANGGOTA
8.	Dr. Drs. YUS SUDARSO, S.H., M.H.	F.PD	ANGGOTA
9.	Hj. KASRIYAH	F.PPP	ANGGOTA
10.	Drs. H. HASANUDDIN A. S., M.Si.	F.PPP	ANGGOTA
11.	Drs. FADHOLI	F.NASDEM	ANGGOTA
12.	SULAEMAN L. HAMZAH	F.NASDEM	ANGGOTA

#### **D. MAKSUD DAN TUJUAN**

Kunjungan Kerja merupakan bagian dari kewajiban konstitusional Dewan melakukan fungsi pengawasan terhadap program dan kebijakan pemerintah. Maksud dan tujuan dari Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ini adalah:

1. Mendapatkan informasi secara langsung dilapangan, terkait dengan permasalahan yang dihadapi secara nyata.
2. Menyerap aspirasi masyarakat, *stakeholder* dan Pemerintah Daerah terhadap program dan kegiatan yang telah dijalankan dan yang akan dilaksanakan.
3. Melihat perkembangan kondisi obyek yang dikunjungi.

#### **E. PELAKSANAAN KUNJUNGAN**

Kunjungan Kerja dilaksanakan pada tanggal 14-18 Februari 2019.

#### **F. OBJEK KUNJUNGAN KERJA**

1. Meninjau Pengolahan Kayu di PT. Mansinam Global Mandiri Jayapura
2. Pertemuan dengan Bulog dan Pupuk Kaltim di Jayapura
3. Pertemuan dengan Pembudidaya Ikan di Kampung Yoboi Danau Sentani Jayapura
4. Meninjau Kelompok Tani Tanaman Sagu di Kampung Yobeh Jayapura

#### **G. GAMBARAN UMUM PAPUA**

Kabupaten Jayapura dengan Luas wilayah 17.516.6 Km<sup>2</sup> yang terbagi dalam 19 Distrik 139 Kampung dan 5 Kelurahan terletak diantara 1390-1400 Bujur Timur dan 20 Lintang Utara dan 30 lintang Selatan. Distrik Kaureh dengan luas Wilayah 4.537,9 Km<sup>2</sup> merupakan Distrik terluas di Kabupaten Jayapura atau sekitar 24,88 % dari keseluruhan luas Kabupaten Jayapura dan Distrik Sentani

Barat Distrik merupakan distrik yang luasnya terkecil dengan luas wilayah 129,2 M<sup>2</sup> atau sekitar 0,74 % dari luas Wilayah Kabupaten Jayapura.

Untuk Letak Geografis ibukota Papua, yakni sebelah Utara Samudera Pasifik dan Kabupaten Sarmi, sedangkan sebelah Selatannya Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Tolikara. Kemudian untuk sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Keerom, dan Sebelah Barat dengan Kabupaten Sarmi.

Kemudian untuk keadaan topografi dan lereng Jayapura umumnya relatif terjal dengan kemiringan 5%-30% serta mempunyai ketinggian aktual 0,5m dpl - 1500m dpl, dimana daerah pesisir pantai utara berupa dataran rendah yang bergelombang dengan kemiringan 0%-10% yang ditutupi dengan endapan alluvial. Secara fisik, selain daratan juga terdiri dari rawa sebesar 13.700 Ha.



## H. HASIL KUNJUNGAN KERJA

### 1. MENINJAU PENGOLAHAN KAYU DI PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI JAYAPURA

Pada kunjungan kali ini Komisi IV DPR RI mendapatkan beberapa hal informasi, antara lain:

- Indonesia merupakan Negara yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati terbesar setelah negara Brazil (*highest diversity*) sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk dapat dimanfaatkan secara lestari dan menjadi modal penting bagi pembangunan nasional, yaitu untuk (1) memenuhi pangan (*food*), pakan (*feed*), dan energi (*fuel*), (2) meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
- Hutan merupakan sebuah aset yang sangat berharga karena mampu menghasilkan berbagai macam manfaat yang bernilai dimana kegunaanya diyakini dapat meningkatkan pendapatan rakyat. Selanjutnya hutan merupakan jenis komoditas yang sangat penting dan menjadi primadona di pasar komoditas baik tingkat domestik maupun dunia sehingga perlu dilestarikan, dipelihara dan dijaga dari kejahatan pencurian, perdagangan dan peredaran secara *illegal* guna untuk generasi yang akan datang (anak cucu) dan juga sebagai sumber devisa negara.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum) belum lama menemukan fakta dilapangan dalam operasi rutinnnya mengamankan 199 kontainer kayu ilegal di Pelabuhan Peti Kemas Teluk Lamong dan Pelabuhan Peti Kemas Tanjung Perak dengan kisaran nilai sebesar Rp104,63 Miliar.
- Direktorat Gakum KLHK dalam waktu sebulan telah mengamankan sebanyak 384 kontainer kayu ilegal yang berasal dari Provinsi Papua melalui empat kali operasi pengamanan di Surabaya dan Makassar. Untuk itu, hingga saat ini penyidik KLHK masih memeriksa dokumen dan mengamankan fisik kayunya sebagai barang bukti guna untuk proses lebih lanjut.
- Komisi kecewa bahwa yang hadir dalam pertemuan kunker bukan Pejabat Ditjen Gakkum dan Satuan Tugas Penyelamatan Sumberdaya Alam (SDA) KLHK, namun yang hadir adalah Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Ditjen PHPL yang dalam hal ini tidak mempunyai aspek kebijakan terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat adat dan pengusaha kayu papua.

Aspirasi/Masukan yang disampaikan, diantaranya :

- Memohon kepada Komisi IV DPR RI untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat adat dan para pelaku industri perkayuan Papua yang terdiri dari 6 point petisi dan tuntutan utama, yakni:
  1. Segera berikan akses legal bagi masyarakat adat kelola hutan
  2. Segera berikan regulasi mitra usaha antara masyarakat dan pelaku usaha local non HPH
  3. Segera tetapkan NSPK untuk Papua dan evaluasi HPH di Papua

4. Segera bebaskan kayu masyarakat adat yang dikatakan illegal oleh Gakkum KLHK RI dan hitung berapa kerugian negara untuk selanjutnya dibayar oleh pengirim kayu
  5. Stop bilang kayu dari Papua illegal
  6. Kami ingin segera wujudkan mimpi membangun kawasan industri kayu di Papua.
- Masyarakat adat dan owner industri per kayu Papua meminta kepada Kementerian LHK untuk segera mengeluarkan kebijakan bebas terhadap ratusan kontainer kayu milik masyarakat adat karena bukan murni milik pengusaha saja yang saat ini di tahan oleh Dirjen Gakkum KLHK di Surabaya maupun Makassar.
  - Masyarakat adat mengancam kepada Pemerintah jika kayu tidak dibebaskan segera karena dianggap illegal, maka masyarakat tidak akan mengikuti pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Calon Legislatif dalam waktu dekat ini tepatnya 17 April 2019.
  - Masyarakat adat meminta perlindungan karena mengalami kesusahan dan sedih dalam memenuhi kebutuhan ekonomi (kelaparan), kebutuhan anak sekolah, kebutuhan makan, dan kebutuhan lainnya, karena industri yang menyalurkan kayu masyarakat adat yakni PT. Mansiman Global Mandiri belum membayar tunai (pola kerjasama titip jual) akibat kayu yang akan dibeli / di distribusikan ke daerah lain di tahan oleh Pemerintah.
  - Masyarakat adat meminta kejelasan regulasi Pemerintah Pusat, karena kayu yang didistribusikan sudah layak administrasi oleh Pemerintah Daerah baik Kabupaten maupun Provinsi, namun mengapa di Pemerintah Pusat dianggap illegal. Untuk itu, Masyarakat adat mempertanyakan kepada Pemerintah Pusat terhadap kebijakan dan regulasi yang dianggap merugikan rakyat Papua.
  - Masyarakat adat meminta kepada Pemerintah agar tidak perlu mendengar isu-isu dan info konspirasi yang berkembang di luar bahwa seandainya masyarakat adat Papua diberikan kebebasan mengelola hutannya sendiri maka akan bisa membeli persenjataan sehingga menjadi ancaman disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, mohon dibebaskan penahanan kayu karena permasalahan tersebut bukanlah sesuatu yang besar dan merugikan negara namun dapat mensejahterakan masyarakat adat Papua.

Tanggapan:

- Komisi IV DPR RI selama ini baru mendapatkan penjelasan sepihak dari Dirjen Gakkum KLHK, namun dengan kunjungan Komisi IV DPR – RI ke Jayapura telah mendapatkan perspektif dan informasi baru sebagai bahan untuk menindaklanjuti dengan Kementerian LHK nantinya. Kedepan Komisi IV DPR RI akan memanggil pejabat KLHK yakni Dirjen

Gakkum dan Satgas melalui Rapat kerja atau Rapat Dengar Pendapat guna mencari win-win solusi untuk persoalan 384 kontainer kayu yang di tahan Satgas Penyelamatan SDA KLHK dan Dirjen Gakkum.

- Komisi IV DPR RI akan mendorong penuntasan atau penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Urusan Pemerintahan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akibat sudah bertahun-tahun tidak ada kejelasannya dan dirasa menyulitkan serta tidak keluar-keluar NSPK-nya. Upaya ini dengan tujuan agar kayu-kayu yang keluar dari Tanah Papua tidak dianggap sebagai kayu ilegal lagi, namun di sisi lain Pemerintah telah begitu besar memberikan konsesi kepada HPH pemodal yang mencapai jutaan hektar dengan berbagai kemudahan aturan.
- Komisi IV DPR RI akan membawa data legalitas dari masyarakat adat dan owner perkebunan Papua ke Pusat untuk ditindaklanjuti kejelasannya ke KLHK dan Satgas.
- Komisi IV DPR RI sangat menyayangkan kondisi yang terjadi terkait penahanan kayu dari Papua, karena terkesan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak menghargai Undang-Undang Otsus yang dimiliki oleh Papua, yang selanjutnya menimbulkan nuansa ketidakadilan antara masyarakat adat Papua dengan pengusaha HPH yang nota bene adalah perusahaan besar.
- Komisi IV DPR RI akan mendorong Pemerintah dalam menyikapi penahanan kayu masyarakat adat Papua melalui mediasi atau sejenisnya, karena memandang hukum tidak bisa hitam putih saja, maka harus ada pengecualian untuk kasus-kasus tertentu agar ada pengecualian karena rakyat Papua adalah Warga NKRI.



## 2. PERTEMUAN DENGAN BULOG & PUPUK HOLDING DI JAYAPURA

Pada kunjungan kali ini Komisi IV DPR RI mendapatkan beberapa hal informasi, antara lain:

- Realisasi Pengadaan Beras dalam negeri oleh divisi regional untuk Provinsi Papua pada tahun 2018 sebanyak 33.536 ton dari target 45.000 ton atau sebesar 74,52%. Sedangkan target pada tahun 2019 sebanyak 48.747 ton dengan pencapaian hingga 12 Februari 2019 sebanyak 14.430 ton artinya Bulog masih mempunyai pekerjaan rumah menyelesaikan sisa target, dengan harapan di tahun 2019 penyerapannya dapat melebihi tahun 2018. \
- Realisasi Pengadaan Beras untuk Subdivre Merauke telah merealisasikan pengadaan beras sebanyak 20.963 ton dari target 25.865 ton pada tahun 2018, dan untuk tahun 2019 ditargetkan pengadaan beras hingga sebanyak 29.689 ton
- Realisasi Penyaluran Bansos Rastra pada tahun 2018 mencapai 44.761.630 kg dari target sebesar 62.821.720 kg atau hanya mencapai 84,72% saja. Sedangkan Realisasi Penyaluran Bansos Rastra hingga bulan Februari 2019, baru mencapai sebanyak 1.193.430 kg dari yang ditargetkan sebanyak 8.839.920 kg atau sebesar 13,6%. Untuk itu, Bulog berkomitmen pada tahun 2019 akan menyalurkan bansos sastra sesuai dengan harapan yang ditargetkan guna peningkatan kesejahteraan rakyat.
- Realisasi Penyaluran Bansos Rastra untuk Subdivre Merauke telah merealisasikan penyaluran Delivery Order (DO) sebanyak 9.686.670 kg dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) sebanyak 10.833.990 kg pada tahun 2018, artinya Subdivre Merauke mampu menyalurkan bansos rastra sebesar 89,41%. Sedangkan untuk tahun 2019 Subdivre Merauke hingga Februari 2019 belum menyalurkannya dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) Sebanyak 1.998.830 kg.
- Pemanfaatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Divisi Regional Provinsi Papua mencapai sebanyak 13.635.947,49 kg yang digunakan untuk Operasi Pasar (OP) sebanyak 13.544.118 kg dan untuk bencana sebanyak 91.828 kg.
- Realisasi Ketersediaan Pasokan & Stabilisasi Harga (KPSH) Beras Medium CBP tahun 2018 di Merauke telah mampu menopang kebutuhan rakyat dengan jumlah sebesar 951.015 kg. Sedangkan untuk tahun 2019 baru sebanyak 376.470 kg hingga bulan Februari. Selanjutnya untuk Realisasi Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Bencana Alam baru mencapai 10.000 kg yang dilakukan pada bulan Januari 2019.
- Posisi persediaan beras tahun 2019 divisi regional Papua dan Papua Barat sebanyak 25.741 ton, dimana untuk beras CPB di Subdivre Merauke sebanyak 6.192 ton.



- Ketersediaan stok Gula di Papua dan Papua Barat hingga awal februari sudah ada sebanyak 10.000 ton. Sedangkan Minyak goreng masih ada 15.000 liter an tepung terigu sebanyak 20.000 ton. Berdasarkan kebutuhan rakyat, maka rencana akan dikirim kembali sebanyak 30.000 ton dari Jakarta.
- Khusus untuk Papua hingga Februari 2019, Bulog telah memenuhi logistik setidaknya 6% dari kebutuhan pokok seluruh Indonesia. Artinya Bulog memiliki tantangan yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan logistik di Papua. Oleh karena itu, Bulog mempunyai agenda penting dalam merebut kembali jaringan-jaringan distribusi yang lepas.
- Bulog berkomitmen untuk kedepan akan membangun infrastruktur pasar di seluruh Indonesia dengan slogan “Toko Pangan Kita” di semua pasar yang di data oleh BPS agar bisa langsung dirasakan ke konsumen (memangkas rantai distributor) sehingga akan rakyat dapat menerima harga yang lebih kompetitif (terjangkau).
- Target Bulog di 2019, mampu menembus logistik di 2.100 Pasar seluruh Indonesia. Hal ini merupakan mekanisme kendali harga yang masif agar retail bulog akan kuat dan mampu hadir di masyarakat lokal sehingga Bulog akan dapat merebut kembali logistik pasar yang ada di masyarakat dengan cara bermitra dengan distributor yang mengenal wilayah dengan maksud Bulog dapat masuk Top 10 dalam memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia dan bukan lagi sebagai pembantu distributor-distributor yang ada di Indonesia.
- Bulog berharap pada 10 tahun kedepan dapat menjadi No. 1 distributor bahan pokok di Indonesia dengan target 25%, dan mampu menyetarakan harga bahan pokok di seluruh Indonesia. Contoh konkrit di Puncak Jaya sudah dapat menyetarakan harga minyak goreng.
- Bulog kedepan akan melakukan pendampingan kepada oknum masyarakat yang melakukan transaksi illegal di Indonesia, dimana ditaksir illegal bahan pokok hingga 20 miliar per hari.
- Produksi pupuk untuk Kapasitas Urea secara keseluruhan di Indonesia pada tahun 2019 mencapai sebanyak 8.787.500 ton per tahun oleh produsen PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.
- Produksi pupuk secara keseluruhan di Indonesia pada tahun 2019, untuk Kapasitas SP-36 mencapai sebanyak 500.000 ton per tahun. Sedangkan untuk Kapasitas ZA sebanyak 750.000 ton per tahun. Pupuk SP-36 dan Pupuk ZA keduanya hanya diproduksi oleh PT Petrokimia Gresik.

- Produksi pupuk untuk Kapasitas NPK secara keseluruhan di Indonesia pada tahun 2019 mencapai sebanyak 3120.000 ton per tahun oleh produsen PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.
- Mekanisme Distribusi Pupuk Bersubsidi yakni mengatur pengadaan dan pendistribusian untuk sektor pertanian secara nasional mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV sesuai dengan prinsip 6 (Enam) Tepat, yaitu Tepat Jenis, Jumlah, Harga, Tempat, Waktu dan Mutu, dengan ketentuan:
  1. Produsen Wajib menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan prinsip 6 (Enam) tepat dan memiliki/menguasai gudang di Lini III pada wilayah tanggungjawabnya.
  2. Distributor melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini III sampai ke Lini IV
  3. Pengecer melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan prinsip 6 (Enam) tepat kepada petani dan atau Kelompok Tani berdasarkan RDKK
- Data stok pupuk urea bersubsidi di Papua dan Papua Barat PT Pupuk Kalimantan Timur hingga 12 Februari 2019 sebanyak 1.828 ton dengan ketentuan 2 mingguan sebanyak 557 ton. Sedangkan data stok pupuk bersubsidi PT Petrokimia Gresik untuk ZA sebanyak 130 ton, untuk SP-36 sebanyak 262 ton, untuk Phonska sebanyak 538 ton dan untuk Organik sebanyak 476 ton.
- Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di Papua hingga Februari 2019 sebesar 3.180 ton dari alokasi secara keseluruhan sebesar 21.374 ton. Berikut daftar rincian realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di Papua :

#### Daftar Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Papua

Satuan : Ton

No	Jenis Pupuk	Alokasi	Alokasi s.d	Realisasi S.d	%	
		2019	Februari 2019	12 Feb 2019	(3:1)	(3:2)
		1	2	3		
1	UREA	7,522	1,773	988	13	56
2	ZA (*)	576	90	107	19	119
3	SP-36 (*)	2,654	862	374	14	43
4	NPK PHONSKA (*)	8,375	1,917	1,482	18	77
5	PETROGANIK (*)	2,247	353	229	10	65
	<b>JUMLAH</b>	<b>21,374</b>	<b>4,995</b>	<b>3,180</b>	<b>74</b>	<b>360</b>

(\*) Pupuk ZA, SP-36, NPK Phonska, & Petroganik : Realisasi s.d 07 Feb 19

### Tanggapan:

- Komisi IV DPR RI mengapresiasi kepada Bulog yang telah mendistribusikan beras hingga ke gunung-gunung di wilayah Papua dengan “Toko Pangan Kita” dan juga kepada Pupuk Indonesia Holding dalam menjangkau penyaluran kebutuhan pupuk rakyat sesuai harapan sehingga masyarakat Papua dapat merasakan manfaatnya.
- Komisi IV DPR RI mendukung langkah distribusi Bulog dengan gerakan memperbanyak koperasi, karena dari waktu ke waktu di Papua mulai surut agar rakyat di Papua dapat sejahtera dan dapat meminimalisir oknum yang bermain.
- Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah agar menjelaskan kepada Kementerian Keuangan untuk dapat melunasi dana pinjaman Pupuk Indonesia Holding ke Bank agar kedepan peningkatan kebutuhan pupuk di seluruh Indonesia dapat terdistribusi dengan baik tanpa adanya beban utang.



Gambar Penyerahan Cenderamata dari Komisi IV DPR RI kepada Mitra Kerja saat Pertemuan dengan Bulog dan Pupuk Holding di Jayapura Provinsi Papua

### **3. PERTEMUAN DENGAN PEMBUDIDAYA IKAN DI KAMPUNG YOBOI DANAU SENTANI JAYAPURA**

Pada kunjungan kali ini Komisi IV DPR RI mendapatkan beberapa hal informasi, antara lain:

- Danau sebagai salah satu aset strategis yang mampu menyediakan berbagai macam sumber daya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan rakyat sehingga dalam sistem pemanfaatannya harus memperhatikan daya dukung lingkungan. Dalam kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI telah menyebarkan ikan sejumlah 1 juta ekor ikan ke Danau Sentani.
- Kondisi umum Danau Sentani memiliki luas sebesar 9.360 hektar, dimana danau tersebut berada di Kabupaten Kota Jayapura dengan dominasi Budidaya ikan yakni oleh Ikan Nila.

- Jenis ikan endemik yang ada di danau Sentani adalah Ikan Gabus Danau Sentani (*Oxyeleotris heterodon*), Ikan Pelangi Sentani (*Chilatherina sentaniensis*), Ikan Pelangi Merah (*Glossolepis incisus*) dan Hiu Gergaji (*Pristis microdon*)
- Jumlah Pelaku Usaha Perikanan di Danau Sentani ada 178 Pokdakan dengan 1 pokdakan ada 20 orang. Selain itu, ada 112 Pengusaha KJA dan 40 kelompok Nelayan penangkap ikan.
- Jumlah dan Pembagian KJA sebanyak 3748 petak yang terletak di 24 kampung dengan pemilik KJA sebanyak 2.190 KK (per KK maksimal memiliki 4 petak). Sedangkan untuk pengusaha dibatasi maksimal memiliki 13 petak
- Tangkapan perairan umum pada tahun 2017 mampu hingga 784 ton ikan nila dengan harga berkisar 70-100 rb/kg. sedangkan untuk hasil tangkapan alam pada komoditas non Gabus dihargai Rp 25rb/kg.
- Kampung Yoboi telah ditetapkan sebagai Kampung Minawisata.

Tanggapan:

- Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah dan masyarakat untuk menjaga, memelihara dan melestariakan spesies ikan yang ada di Danau Sentani, mengingat Danau Sentani telah ditetapkan sebagai satu dari 15 danau prioritas nasional.
- Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah dan masyarakat agar dalam memanfaatkan Danau Sentani melalui pendekatan kearifan lokal, keseimbangan lingkungan dan memegang prinsip-prinsip pengelolaan berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat Kampung Yoboi.
- Komisi IV DPR RI meminta kepada masyarakat kampung Yoboi agar mengajukan proposal ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar rumah-rumah warga dapat direnovasi dengan Bantuan Pemerintah (BP) melalui Rumah Swadaya.
- Komisi IV DPR RI meminta kepada masyarakat untuk berhati-hati dengan adanya pertumbuhan eceng gondok yang mampu merusak lingkungan di Danau sentani sehingga perlu dicari solusinya karena Danau Sentani sudah masuk dalam winawisata. Terlebih lagi dalam waktu dekat Papua akan ada kegiatan PON 2020. Untuk itu diharapkan Papua kedepan dapat meraih status Kota Adipura.



Gambar Pertemuan dan Pertemuan dengan Pembudidaya Ikan di kampung Yoboi, seklaigus melakukan penebaran benih Ikan sebanyak 1 juta

#### 4. **MENINJAU KELOMPOK TANI TANAMAN SAGU DI KAMPUNG YOBEBH JAYAPURA**

Pada kunjungan kali ini Komisi IV DPR RI mendapatkan beberapa hal informasi tentang profil Bali Zoo I, antara lain:

- Tanaman sagu saat ini sekitar 11.130 ha, sehingga dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan manusia yang sangat cepat maka dapat berimplikasi habisnya tanaman sagu di Indonesia. Untuk itu, diharapkan ada teknologi produksi dalam budidaya tanaman sagu yang cepat.
- Perubahan iklim secara global mengakibatkan dampak di semua sektor termasuk produksi pangan. Berdasarkan catatan produksi beras, jagung dan ubi kayu produksinya tidak sejalan dengan laju jumlah penduduk yang sangat cepat dan tak terkendali dimana tahun 2035, diprediksi terjadi peningkatan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 305 juta jiwa sehingga kompetisi mendapatkan pangan terbaik akan meningkat, dan pada tahun 2050 diprediksi kebutuhan pangan bagi populasi dunia juga semakin meningkat untuk 9,7 miliar penduduk, sehingga harus ada sumber pangan alternatif yang dapat diterima masyarakat luas dalam rangka pemenuhan pangan manusia.
- Sagu adalah solusi terbaik sebagai pangan alternatif dalam memenuhi kebutuhan karbohidrat karena diketahui sejak lama tanaman sagu dikenal sebagai makanan bagi masyarakat, khususnya di Papua dimana tanaman sagu menyimpan pati sebagai cadangan pangan, yakni di

bagian batang sehingga sagu dijadikan makanan pokok (pepeda) bagi masyarakat Papua dan Maluku .

- Manfaat sagu diantaranya sebagai sumber energi tubuh dan dapat mencegah darah tinggi, memperlancar sistem pencernaan, meningkatkan kesehatan tulang dan sendi, menjaga suhu tubuh agar tetap dingin serta dapat sebagai masker wajah alami.

Aspirasi/Masukan yang disampaikan, antara lain:

- a. Petani dan Pengolah tanaman sagu memohon kepada Komisi IV DPR RI untuk mendukung pengadaan mesin pengolah tanaman sagu dari Kementerian Pertanian kepada rakyat Papua.
- b. Petani dan Pengolah tanaman sagu memohon kepada Komisi IV DPR RI agar dapat mendukung pembuatan jalan produksi di hutan tanaman sagu, mengingat saat panen petani kesusahan dalam menjangkau daerah pedalaman tanaman sagu sehingga baru dapat panen di pinggiran hutan tanaman sagu saja.

Tanggapan:

- Komisi IV DPR RI meminta kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian untuk membuat inovasi dan rekayasa teknologi terhadap tanaman sagu dimana semula membutuhkan waktu produksi 9-12 tahun diperpendek menjadi usia produksi 5-7 tahun.
- Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti kepada Kementerian Pertanian untuk membantu mesin pengolah tanaman sagu melalui anggota dewan yang dapil Papua, dimana hingga saat ini hanya dibantu oleh swasta.
- Komisi IV DPR RI mendorong dan mendukung kepada pelaku budidaya tanaman sagu agar dibuatkan jalan produksi hingga kepedalaman hutan sehingga petani tetap eksis dalam melaksanakan budidaya, karena selain untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, juga dapat meningkatkan perekonomian rakyat.





Gambar Pertemuan dan Kunjungan Kerja Komisi IV ke Petani Tanaman Sagu

## I. KESIMPULAN

- a. Arahan Komisi IV DPR RI kepada Kementerian Pertanian, antara lain:
  - Komisi IV DPR RI meminta kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian untuk membuat inovasi dan rekayasa teknologi terhadap usia produksi tanaman sagu yang semula membutuhkan waktu produksi 9-12 tahun diperpendek menjadi usia produksi 5-7 tahun.
  - Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Pertanian agar dibuatkan jalan produksi hingga kepedalaman hutan sehingga petani tetap eksis dalam melaksanakan budidaya, karena selain untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, juga dapat meningkatkan perekonomian rakyat.
  - Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Pertanian untuk membantu mesin pengolah tanaman sagu kepada masyarakat Papua sehingga buah yang sudah matang di pedalaman hutan tanaman sagu dapat dimanfaatkan dengan optimal.
- b. Arahan Komisi IV DPR RI kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, antara lain:
  - Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan khususnya Pejabat KLHK yakni Dirjen Gakkum dan Satgas melalui Rapat Kerja atau Rapat Dengar Pendapat untuk menjelaskan dan mencari win-win solusi terhadap persoalan 384 kontainer kayu yang ditahan Satgas Penyelamatan SDA KLHK dan Dirjen Gakkum milik masyarakat adat Jayapura.
  - Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar segera menuntaskan atau menetapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) masyarakat adat karena sudah bertahun-tahun tidak ada kejelasan. Hal ini sebagai bentuk legalisasi kayu masyarakat adat Papua dapat keluar dari Tanah Papua sehingga tidak dianggap sebagai kayu illegal lagi.

- Komisi IV DPR RI sangat menyayangkan kondisi yang terjadi terkait penahanan kayu dari Papua, karena terkesan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak menghargai Undang-Undang Otsus yang dimiliki oleh Papua, yang selanjutnya menimbulkan nuansa ketidakadilan antara masyarakat adat Papua dengan pengusaha HPH yang notabene adalah perusahaan besar.
  - Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar dapat menyikapi penahanan kayu masyarakat adat Papua dengan pengecualian khusus.
- c. Arahan Komisi IV DPR RI kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, antara lain:
- Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat menjaga, memelihara dan melestarikan ekosistem Danau Sentani agar spesies ikan yang ada tidak punah.
  - Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan agar dalam memanfaatkan Danau Sentani melalui pendekatan kearifan lokal, keseimbangan lingkungan dan memegang prinsip-prinsip pengelolaan berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat di Kampung Yoboi dan sekitarnya
  - Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membantu masyarakat kampung Yoboi dalam memanfaatkan eceng gondok yang lambat laun semakin banyak di Danau Sentani agar tidak merusak lingkungan. Terlebih lagi Danau Sentani sudah dicanangkan sebagai Winawisata dan kedepan ingin meraih penghargaan Kota Adipura serta akan ada kegiatan PON 2020.
- d. Arahan Komisi IV DPR RI kepada Badan Urusan Logistik dan Pupuk Indonesia, antara lain:
- Komisi IV DPR RI mengapresiasi kepada Bulog yang telah mendistribusikan beras hingga ke gunung-gunung di wilayah Papua dengan “Toko Pangan Kita” dan juga kepada Pupuk Indonesia Holding dalam menjangkau penyaluran kebutuhan pupuk rakyat sesuai harapan sehingga masyarakat Papua dapat merasakan manfaatnya.
  - Komisi IV DPR RI mendukung langkah distribusi Bulog dengan gerakan memperbanyak koperasi, karena dari waktu ke waktu di Papua keberadaan koperasi mulai surut agar rakyat di Papua dapat sejahtera dan dapat meminimalisir oknum bahan pangan yang bermain.
  - Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah agar menjelaskan kepada Kementerian Keuangan untuk dapat melunasi dana pinjaman Pupuk Indonesia Holding ke Bank agar kedepan peningkatan kebutuhan pupuk di seluruh Indonesia dapat terdistribusi dengan baik tanpa adanya beban hutang.



## **J. PENUTUP**

Demikian laporan Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Provinsi Papua, diharapkan laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan masukan dalam rapat-rapat dengan mitra kerja Komisi IV DPR RI yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan mitra Komisi IV DPR RI lainnya.

**Ketua Tim  
Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI,**

**ttd**

**Dr. MICHAEL WATIMENA, S.E, M.M.**

A-457

**LAMPIRAN I**  
**MITRA YANG MENDAMPINGI**

<b>UNIT</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
<b>KEMENTERIAN PERTANIAN</b>	Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si.	Kepala Badan Litbang
	Ir. Rahmanto, M.Sc.	Direktur Irigasi
	Drh. Purwanta, M.Kes.	Direktur Polbangtan Manokwari
	Ir. Warjito, M.Si.	Kepala Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Ir. Dedi Junaedi, M.Sc.	Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
<b>KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	Dr. Ir. Aryo Hanggono, DEA.	Staf Ahli Menteri bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut
	Ir. Arik Hari Wibowo, M.Si.	Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan
<b>KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b>	Dr. Ir. Ruffie, M.Sc.	Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Ditjen PHPL
<b>BULOG</b>	Ibu Judith J. Dipodiputro	Direktur Komersial
<b>PUPUK</b>	Satriyo Nugroho	Direktur Teknik dan Pengembangan Pupuk Kaltim
	Yusri	General Manajer

## LAMPIRAN II BEBERAPA PUBLIKASI MEDIA

- <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/24054/t/Kayu+Papua+Dianggap+Illegal%2C+Komisi+IV+Akan+Panggil+Ditjen+Gakkum>
- <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/23987/t/Pelaku+Budi+Daya+Sagu+Butuh+Alat+Pengolahan>
- <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/24001/t/Keanekaragaman+Hayati+Danau+Sentani+Harus+Dijaga>
- <https://m.wartaplus.com/read/5035/Komisi-IV-DPR-RI-Kunker-di-Jayapura-Ini-Penjelasan-Michael-Wattimena>
- <http://papua.litbang.pertanian.go.id/index.php/berita1/687-koordinasi-kunjungan-kerja-komisi-iv-dpr-ri-bersama-kepala-badan-litbang-pertanian-di-prov-papua>
- <http://www.parapatv.id/komisi-iv-dpr-ri-mengelola-hutan-adat-di-papua-harus-ada-regulasi-baru/>
- <https://tabloidsinartani.com/detail/indeks/tekno-lingkungan/7928-Masyarakat-Papua-Meminta-Diberikan-Akses-Legal-Kayu-Mereka>
- <http://www.salampapua.com/2019/02/komisi-iv-dpr-serap-aspirasi-masyarakat.html?m=1>
- <https://www.tifaonline.com/2019/02/15/kunker-komisi-iv-dpr-ri-di-jayapura-ini-6-point-petisi-masyarakat-adat-untuk-klhk-soal-pengelolaan-hutan-adat/>
- <https://papua.antarane.ws.com/berita/479707/komisi-iv-dpr-ri-serap-aspirasi-masyarakat-adat-pemilik-ulayat>
- <http://papuaunik.com/2019/02/16/komisi-iv-dpr-ri-bertemu-masyarakat-adat-pemilik-ulayat/>
- <http://dpr.go.id/berita/detail/id/23970/t/Jangan+Korbankan+Masyarakat+Adat>
- <http://tribranews.papua.polri.go.id/v2/berita/kapolsek-sentani-kota-hadiri-kunjungan-kerja-komisi-iv-dpr-ri-di-kampung-yoboi-dan-komba.html>
- <https://www.ceposonline.com/2019/02/15/5000-benih-ikan-dilepas-di-kampung-yoboi/>
- <http://www.orideknews.com/kunker-kepala-badan-litbang-pertanian-bersama-komisi-iv-iv-dpr-ri-di-jayapura-kepala-bulog-divre-papua-pb-sampaikan-hal-ini/>

- <http://www.orideknews.com/kunker-komisi-iv-dpr-ri-di-jayapura-masyarakat-adat-sampaikan-6-poin-terkait-pengelolaan-hutan/>
- <https://tabloidsinartani.com/detail/indeks/kebun/7943-Kebun-Sagu-Papua-Milik-Rakyat-Perlu-Bantuan-Alat-Pengolah>
- <http://www.orideknews.com/michael-watimena-dan-rombongan-komisi-iv-dpr-ri-serahkan-10-ribu-bibit-ikan-di-danau-sentani/>
- <https://www.validnews.id/Masyarakat-Adat-Curhat-Ke-DPR-Soal-Kayu-Ilegal-Bgc>